

MEWUJUDKAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL SEJAJAR DENGAN MASYARAKAT PADA UMUMNYA

Sugiyanto dan Mochamad Syawie

Abstract. Indigenous people is local social culture groups, separately and uninvolved in network and services in social, economic, or politic. The separated that mean social culture, there is gap between level of social culture in tribes with Indonesian conditions enclosed. The means of development are discontinuously to progress for people. "Progress" is useful toward humanity aspect from development, and measured with awareness and capability a part of community have to better life and welfare.

Keyword : Indigenous people, empowerment, social welfare.

I. PENDAHULUAN

Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik dengan tujuh kriteria, antara lain berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen. Pada umumnya terpencil secara geografis dan secara sosial budaya tertinggal dengan masyarakat yang lebih luas, dan masih hidup dengan sistem ekonomi subsisten (Dir. Pemberdayaan KAT, 2005).

Persepsi tentang KAT di Indonesia masih beragam, dan terminologi yang digunakanpun telah mengalami perkembangan. Pada tahun 1973 dikenal dengan sebutan Suku Terasing, kemudian pada tahun 1994 menjadi Masyarakat Terasing. Terakhir pada tahun 1999 menjadi Komunitas Adat Terpencil (KAT), dengan perubahan pada karakteristiknya.

Selanjutnya, diakui bahwa "keterasingan" pada mereka dalam arti sosial budaya. Terdapat perbedaan yang khas antara sosial budaya KAT dengan kondisi sosial budaya bangsa Indonesia pada umumnya. Perbedaan tersebut menempatkan KAT sebagai komunitas yang menjalani kehidupan secara tradisional (masih terbelakang) dibandingkan dengan kehidupan masyarakat pada umumnya yang menjalani kehidupan secara modern.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soebadio (Koentjaraningrat, 1993) sampai saat ini masih dirasakan kesenjangan sosial-budaya itu. Bahkan taraf hidup suku-suku bangsa bersangkutan menjadi kendala dalam usaha pembangunan sebagai bangsa. Kita merasa tidak mungkin membiarkan sebagian dari bangsa kita berada dalam taraf kesehatan, pendidikan dan pengembangan secara umum yang kita nilai jauh dibawah standar menurut ukuran masa kini. Demikianlah kita merasa bertanggung jawab atas pengembangan suku-suku

bersangkutan, supaya mereka akhirnya mampu ikut hidup sesuai pola dan patokan kesehatan dan pendidikan masa kini, sehingga mampu juga mengikuti usaha pembangunan yang tengah kita.

Dalam tulisan berjudul *The Meaning of Development* yang ditulis oleh Seer (Koentjaraningrat, 1993) mengenai kebijaksanaan membangun serta mengubah masyarakat pada umumnya, ia berpendapat, bahwa pembangunan tidak selamanya berarti kemajuan bagi semua orang. Oleh karena itu, "kemajuan" sebaiknya selalu mengacu ke aspek manusiawi dari pembangunan, dan diukur dengan derajat kesadaran dan kemampuan sebagian besar warga masyarakat yang bersangkutan untuk hidup lebih nyaman dan sejahtera. Berdasarkan konsep "kemajuan" pada definisi tersebut, maka semua upaya pembangunan paling tidak dapat mengakibatkan : 1) perubahan degeneratif; 2) perubahan tanpa kemajuan; dan 3) perubahan yang membawa kemajuan sosial ekonomi.

Perubahan degeneratif adalah perubahan yang telah merusak keseimbangan dari kehidupan sosial suatu masyarakat, dan seringkali juga merusak keseimbangan ekologi lingkungan alamnya. Keadaan seperti ini dapat timbul karena para *change agent* hanya melakukan pendekatan bagi kepentingan mereka sendiri. Mereka menyelesaikan tugas yang telah ditargetkan dalam waktu yang sesingkat mungkin (kalau mungkin dengan cara memaksa), tanpa memperhatikan keperluan warga masyarakat yang mereka "bangun" dengan lebih seksama.

Mendukung pendapat Seers, Hans Kalipke (Orin Basuki, 2003) mengungkapkan bahwa pada tahun 1979, jauh di pedalaman hutan Mandau, Minas, dan Bukit Kapur, Kabupaten Bengkalis,

Provinsi Riau, suatu suku pedalaman, yakni Suku Sakai, tengah bergulat dengan proses penghilangan eksistensi mereka seiring pembabatan kekayaan terbesar yang mereka miliki, yaitu hutan. Di tengah kemiskinan suku yang terbiasa dengan pakaian berbahan kulit kayu inilah, Kalipke menetap selama tidak kurang 17 tahun.

Pada saat bangsa Indonesia sendiri kurang mempedulikan kesulitan hidup yang dialami suku Sakai, Kalipke justru menetap di tengah keluarga Sakai, di pedalaman Bengkalis. Hidup bersama, bergaul, menetap, dan mengikuti cara hidup suku Sakai yang berpindah-pindah pada saat membuka lahan untuk berladang. Hidup bersama suku pedalaman di Riau merupakan pengalaman yang sangat mengesankan bagi Kalipke, sekaligus menyedihkan. Menyedihkan karena suku Sakai cenderung kurang mendapat perhatian penuh dari bangsanya sendiri. Kesedihan itu dirasakan ketika mengawali proyek penelitiannya yang diberi tema "Pikiran dan Pengertian Asal", dengan memilih komunitas suku Sakai sebagai subyek. Menurutny, cenderung penelitian semacam ini sangat jarang diminati orang. Dia hanya berharap, riset yang didukung Universitas Hamburg, Jerman, ini akan menggali pemikiran asli dari warga suku pedalaman.

Ahli antropologi G.O. Lang (Koentjaraningrat, 1993) menyarankan suatu konsep yang relatif dapat digunakan sebagai pegangan untuk merencanakan beberapa kebijaksanaan pembangunan KAT. Kebijakan tersebut antara lain, pertama: disebut *traditional community development approach* (pendekatan pembangunan masyarakat yang tradisional), sebaiknya memperhatikan sumber daya lokal, kepemimpinan lokal, dan kemandirian komunitas adat terpencil

yang akan dibangun. Kedua, disebut *paternalistic approach* (pendekatan paternalistik) berdasarkan gagasan bahwa masyarakat yang dibangun masih sangat rendah kemampuannya. Ketiga, *engineering physical infrastructure approach* (pendekatan prasarana fisik), berdasarkan prinsip bahwa *change agent* hanya memberi modal dan teknologi untuk memudahkan pembangunan yang dikembangkan dengan sumber daya lokal (dari bawah) dan kepemimpinan lokal.

Berdasarkan hasil pemetaan tahun 2005, populasi dan persebaran pemberdayaan komunitas adat terpencil adalah yang sudah diberdayakan sebesar 61.488, yang sedang diberdayakan 13.177, dan yang belum diberdayakan sebesar 193.185 (Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, 2005).

II. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI KAT

Sebagian besar bangsa Indonesia berasumsi dan mempunyai keyakinan bahwa pembangunan nasional membawa kemajuan yang berarti, kehidupan yang lebih aman, sejahtera, dan sempurna bagi semua golongan, lapisan sosial dan suku bangsa di Indonesia (Koentjaraningrat, 1993).

Dalam rangka itu, kita tentu perlu mempersoalkan mengapa hingga sekarang masih ada warganegara Indonesia yang hidup dalam masyarakat terpencil yang kita anggap terbelakang dan tidak maju. Kalau kita memecahkan persoalan itu dengan jawaban bahwa masyarakat terpencil di negara kita tidak maju karena lokasinya terpencil, dan sama sekali tidak atau hanya sedikit mengalami hubungan dengan dunia luar, jawaban itu juga tidak seluruhnya benar.

Mengutip pandangan Ismid Hadad (1980) bahwa, istilah “pembangunan” dewasa ini semakin berkembang laksana mukjizat. Ia mengandung begitu banyak makna, mempunyai fungsi begitu berganda, menimbulkan begitu banyak harapan, tapi juga membawa perdebatan yang tak habis-habisnya di kalangan masyarakat yang semakin meluas. Namun, apapun makna, fungsi dan harapan yang terkait pada istilah tersebut, senantiasa ada suatu nilai positif yang melekat atau dilekatkan padanya. Hampir tidak ada pihak yang mengatakan bahwa pembangunan itu jelek, karena ada semacam kesepakatan umum bahwa pembangunan itu harus otomatis baik pasti bermanfaat

Secara umum, permasalahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan KAT disebabkan oleh dua hal mendasar yang terkait satu sama lain, yaitu (1) keterbatasan sumberdaya manusia dan (2) keterbatasan keterpaduan program.

Permasalahan yang dihadapi oleh KAT seperti :

1. Pendidikan. Pada umumnya KAT berpendidikan rendah, buta huruf dan bahkan ada KAT yang menolak masuknya pendidikan karena dinilai pendidikan bertentangan dengan adat istiadat mereka. Misalnya, Orang rimba di Provinsi Jambi.
2. Transportasi. Sarana transportasi masih sangat terbatas untuk keluar maupun masuk ke lokasi KAT. Mereka pada umumnya berjalan kaki berjam-jam untuk meninggalkan kampung halamannya. Demikian pula, bagi orang luar yang bermaksud memasuki lokasi KAT, relatif sulit memperoleh sarana transportasi. Pada lokasi tertentu, untuk ke lokasi KAT digunakan perahu ketotok, kuda atau

- kendaraan roda empat yang khusus untuk kondisi alam yang sulit.
3. Tenaga pengajar. Kondisi geografis yang sulit dijangkau dan masih terbatasnya sarana transportasi serta fasilitas hidup lainnya, menjadi alasan enggannya tenaga pengajar ditugaskan ke lokasi KAT.
 4. Tenaga medis. Sama halnya alasan pada terbatasnya tenaga pengajar, kondisi geografis yang sulit dan terbatasnya sarana transportasi serta fasilitas hidup lainnya, menjadi alasan enggannya tenaga medis untuk ditugaskan ke lokasi KAT.
 5. Fasilitas pemerintah. Di lokasi tersebut masih sangat terbatas tersedianya fasilitas dan sarana umum seperti jalan untuk kendaraan roda empat, jembatan, listrik, air bersih dan sebagainya.
 6. Koordinasi. KAT sebagai bagian dari kemiskinan perlu ditangani secara koordinatif dari berbagai instansi sektoral. Kenyataannya sangat sulit untuk membangun koordinasi ini, sehingga terkesan program penanganan kemiskinan berjalan sendiri-sendiri dan hasilnya pun kurang optimal.

III. KEBUDAYAAN SEBAGAI REFERENSI PERUBAHAN

Teori antropologi tentang perubahan kebudayaan menyarankan agar diperhatikan respons dari masyarakat ("sejajar dengan masyarakat pada umumnya"), terhadap rangsangan unsur-unsur yang datang dari luar. Sedikitnya ada tiga respons terhadap tiga macam pengaruh unsur-unsur kebudayaan dari luar, yaitu:

1. Warga masyarakat terasing (baca komunitas adat terpencil) sebenarnya mau menerima pengaruh dari luar yang dapat memberikan kenyamanan dan kesejahteraan yang lebih besar bagi mereka, atau dengan perkataan lain, yang dapat membawa kemajuan dalam hidup mereka. Namun mereka tidak atau belum mampu melakukan perubahan kebudayaan, dan karena itu mereka tetap hidup dengan cara yang diwariskan oleh nenek-moyang mereka.
2. Komunitas adat terpencil memang ingin maju, namun mereka menganggap bahwa pihak luar tidak mau membagi unsur-unsur kebudayaan yang membawa kemajuan itu dengan mereka.
3. Komunitas adat terpencil memang tidak mau berubah, dan berupaya dengan berbagai cara untuk mempertahankan kebudayaan warisan nenek moyang selama mungkin dengan cara menolak setiap unsur pengaruh yang datang dari luar (Koentjaraningrat, 1993).

Mengubah kebudayaan berarti mengubah adat-istiadat, kebiasaan dan gaya hidup seseorang yang telah lama dipelajari, dikenal dan dibudayakan sejak kecil. Hal itu tentu dirasakan sangat berat, karena ia harus meninggalkan dan akan kehilangan pegangan hidupnya, walaupun cara hidup yang baru itu dapat membawa kemajuan baginya. Untuk itu perlu motivasi atau dorongan yang kuat dari dalam atau dari luar.

Dalam perspektif di atas, intervensi yang terbaik dalam memberdayakan KAT adalah pembangunan komunitas tersebut. Pembangunan komunitas dapat dilihat sebagai proses, dimana warga dari KAT mengorganisasi diri dalam kelompok dan

merasakan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi atau masalah-masalah yang harus diatasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup (Parsudi Suparlan, 2003). Kelompok ini membuat rencana-rencana kerja sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka penuhi, atau mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi untuk dapat diatasi bersama. Berdasarkan hal tersebut mereka mengorganisasi diri dalam bentuk kelompok-kelompok kerja atau perkumpulan-perkumpulan untuk melaksanakannya.

IV. PENUTUP

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, upaya mewujudkan KAT sebagaimana masyarakat pada umumnya dihadapkan pada kesulitan apabila tidak memperhatikan penanganan yang serius terhadap persoalan kemiskinan, pendidikan, serta masalah kesehatan. Karena akar masalah yang dihadapi KAT terletak pada ketiga persoalan mendasar tersebut.

Oleh karena itu, yang diperlukan adalah kebijakan dan program yang menjembatani kepentingan KAT, dan menerjemahkan nilai-nilai sosial budaya mereka ke dalam kegiatan nyata untuk memperbaiki kehidupan dan meningkatkan kesejahteraannya.

DAFTAR PUSTAKA

Hadad, Ismid, 1980, *Persoalan dan Perkembangan Pemikiran dalam Teori Pembangunan*, dalam *Prisma, Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial*, LP3ES, Jakarta.

Khairina, "Kami Sekolah Hanya Dua Minggu Sekali", dalam *Kompas*, 22/8/2005

Basuki, Orin, *Sebuah Kamus Untuk Warga Sakai*, dalam *Kompas*, 2/1/2003.

Koentjaraningrat, dkk, 1993, *Masyarakat Terasing di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Departemen Sosial R.I, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, 2005, *Profil Keberhasilan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Pada 8 Provinsi*, Jakarta.

Suparlan, Parsudi, 2003, *Pembangunan Komuniti Terpencil (KAT)*, Makalah Seminar Hasil Penelitian KAT Departemen Sosial & Pranata Pembanguna UI, Jakarta.

Sugiyanto, Alumnus Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah, Program Studi Pengembangan Masyarakat. Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

Mochamad Syawie, Alumnus Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Program Studi Sosiologi. Peneliti pada Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat dan Dosen Luar Biasa Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta.